



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YULIOT
2. Jabatan : DEPUTI
3. NHK : 58896

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 5.525.424.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/70 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
2. Tanah Seluas 44000 m2 di KAB / KOTA PADANG PARIAMAN, HASIL SENDIRI Rp. 780.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 311 m2/112 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG PANJANG , HASIL SENDIRI Rp. 622.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 177 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 708.000.000
5. Tanah Seluas 224 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 560.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/140 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 239 m2/530 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 875.424.000
8. Tanah Seluas 232 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 580.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 465.000.000**

1. LAINNYA, TRANLONG TRACTOR RODA 4 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 1.085.500.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	600.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.548.614.074
F. HARTA LAINNYA	Rp.	15.000.000
Sub Total	Rp.	9.239.538.074
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	9.239.538.074

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.